

Implementasi Program RT BERSIH (Rapi, Tertib, Bersih, Indah, Sehat dan Harmonis) Di Desa Tanjung Lapang RT III, Kecamatan Malinau Barat

Febiana¹, Badruddin Nasir²

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Program RT BERSIH (Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Harmonis) di desa Tanjung Lapang RT III Kecamatan Malinau Barat yang menjadi salah satu Program Unggulan di Kabupaten Malinau. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang di peroleh dari sumber data primer dan data sekunder dengan teknik referensi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program RT BERSIH (Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Harmonis) di desa Tanjung Lapang RT III Kecamatan Malinau Barat memberikan manfaat yang baik bagi tiga sasaran prioritas pembangunan seperti pada bidang Tata Kelola Pemerintah, program ini memberikan penyediaan dan pelayanan kepada masyarakat. Bidang Infrastruktur, program ini memberikan pemenuhan dalam meningkatkan fasilitas baik berupa sarana maupun prasarana. Dan terakhir pada bidang Sumber Daya Manusia, program ini dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup melalui bantuan pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program masih terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia terkait pengurus dan pendamping serta kesadaran masyarakat itu sendiri dalam hal berpartisipasi. Untuk mengurangi kendala tersebut Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi dan memberikan pelatihan serta bantuan berkelanjutan kepada administrator.

Kata Kunci : Implementasi Program RT BERSIH

Pendahuluan

Kabupaten Malinau adalah salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan tepatnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, didirikan sesuai dengan UU No 47 Tahun 1999. Kabupaten Malinau terdiri dari 15 Kecamatan, 109 Desa dan 5 Kecamatan berada di wilayah perbatasan RI dan Malaysia. Pada hakikatnya, latar belakang pemekaran Kabupaten Malinau menjadi Daerah Otonomi baru adalah faktor jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas. Penanganan persoalan pembangunan yang tidak berjalan baik

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: feby10201@gmail.com

² Dosen Pembimbing Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

mengakibatkan ketertinggalan keterbatasan rakyat. Luas wilayah Kabupaten Malinau yakni 38.973,56 km². Pembangunan pada tahun pertama yaitu sekitar tahun 2001 hingga 2005 masih terasa sangat berat. Kondisi infrastruktur juga sangat terbatas. Akibatnya, penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik terhambat. Ketika Kabupaten Malinau dimekarkan dan melaksanakan pembangunan sepuluh tahun pertama, tingkat kemiskinan berada pada angka 26% (Yansen, T.(2022). Ketika itu, kondisi Pemerintahan dan pembangunan masih sangat terbatas, rendah dan sangat kurang, bahkan dapat dikatakan tidak ada (nol). Pada masa Pemerintahan Bupati bapak Yansen TP, M.Si, dengan membawa program kerja Unggulan bernama Gerdema, Kabupaten Malinau perlahan mengalami perubahan meningkat. Model Gerdema menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Semangatnya adalah 'Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat'. Gerdema menempatkan desa dan masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan. Pelaksanaan Gerdema selama lima tahun terakhir (2012-2016) menegaskan bahwa masyarakat desa dan Pemerintah desa telah mampu menjadi pelaku utama pembangunan dan menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan desa. Melalui Kepres Nomor 5 Tahun 2015 menyebutkan Kabupaten Malinau bukan sebagai Kabupaten keterbelakang. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyatakan Kabupaten ini melalui Gerdema terlebih dahulu membangun dari desa sebelum ada UU No 6 Tahun 2014 mengenai Desa oleh Pemerintah Pusat (Supri, 2021).

Kekuatan pembangunan diberikan kepada RT sebagai pelaku dan pemilik kepentingan rakyat. Rukun tetangga adalah substansi terkecil dari Pemerintah desa. Penyelenggaraan tugas RT dan penyelenggaraan Pemerintah desa dengan substansi penyelenggaraan masing-masing, artinya ketua RT sebagai pelaksana teknis program dan Kepala desa sebagai pengendali berkolaborasi dengan ketua RT untuk masalah pembangunan. Rukun tetangga dan desa di haruskan melakukan kerja sama dengan rakyat baik dalam berdiskusi dan penentuan program serta pelaksanaan sebuah program, ketua RT diwajibkan mengetahui bagaimana kondisi lingkungannya supaya bisa membuat perencanaan program guna memajukan RTnya.

Program RT BERSIH tertuang dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 tentang Program RT BERSIH. Program ini menjadi kekuatan pembangunan masyarakat di tingkat rukun tetangga dan di anggap begitu penting untuk penyelenggaraan Gerdema, sebab program ini akan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat Kabupaten Malinau. RT BERSIH bukan sekedar ucapan atau gambaran suatu yang bersih di RT, tetapi RT BERSIH mempunyai makna yang luas berkaitan dengan tantangan nilai hidup manusia yang berkualitas, hal ini dipertegas oleh Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si dihadapan Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Dr. Ir. Ety Diana, MS (Sanip. 2018). Program RT BERSIH dijalankan sejak tahun 2016 oleh Bupati

lama yaitu Bapak Dr. Yansen TP, M.Si dalam dua periode kepemimpinannya hingga tahun 2021, kemudian program ini dilanjutkan oleh Bupati baru yaitu Bapak Wempi W. Mawa, SE dari tahun 2021 hingga sekarang.

Strategi dalam melaksanakan program ini oleh Pemerintah Kabupaten Malinau yaitu harus memastikan tahapan pencairan dana hanya dengan dua tahapan, kemudian untuk petunjuk pelaksanaan dan pedoman mengenai cara pemanfaatan anggaran operasional sudah tercantum di dalam Peraturan Bupati. Presentasi alokasi dana RT ini didasarkan pada kebutuhan RT melalui hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat rukun tetangga. Bupati lama Bapak Dr Yansen menyatakan bahwa musrenbang RT yang secara normatif dilakukan setiap tahun memiliki banyak kelemahan diantaranya adalah masih kurangnya kehadiran masyarakat yang berdampak pada masih terbatasnya kualitas usulan kegiatan ditingkat desa. Mekanisme pelaksanaan dan petunjuk teknis pencairan serta pengalokasian anggaran dana rukun tetangga telah diatur juga dalam Peraturan Bupati Malinau melalui OPD terkait. Sekretaris daerah Kabupaten Malinau Dr. Ernes Silvanus menjelaskan bahwa penggunaan anggaran RT BERSIH sebesar Rp 260.000.000/Tahun.

Bentuk implementasi program RT BERSIH di desa Tanjung Lapang sendiri dapat dilihat dari dua bentuk yaitu pertama pembangunan fisik dan kedua pembangunan non fisik. Menurut B.S Muljana (2001:3) pembangunan yang dilakukan Pemerintah biasanya berbentuk infrastruktur atau prasarana yakni bangunan fisik maupun lembaga yang memiliki kegiatan lainnya di bidang perekonomian, budaya dan pertahanan. Selain program pembangunan yang bergerak di bidang pembangunan fisik juga harus bergerak di bidang pembangunan non fisik atau sosial yakni sumber daya manusia, kesehatan dan pendidikan. Implementasi pembangunan fisik di desa Tanjung Lapang RT III meliputi kegiatan rehab rumah, pembangunan kantor RT dan poskamling, serta perbaikan prasarana umum warga. Sedangkan implementasi pembangunan non fisik meliputi kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang RT), pendidikan dan kesehatan. Dalam pengimplementasian program RT BERSIH di temukan bahwa jumlah partisipasi masyarakat yang sangat kurang menjadi salah satu faktor penghambat yang hingga saat ini tidak dapat dihindari. Masih banyak warga yang masih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Dari data yang didapatkan ada sekitar 57 KK yang ada didesa Tanjung Lapang khususnya RT III, partisipasi dalam melaksanakan program ini biasanya hanya sebagian dari keseluruhan warga. Kepekaan masyarakat terhadap kepentingan umum semakin berkurang karena kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kurang optimalnya hasil yang diharapkan. Implementasi program RT BERSIH ini memiliki harapan besar kepada masyarakat untuk dapat bekerjasama dan kompak dalam membangun lingkungannya menjadi lebih maju dan lebih baik.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Implementasi

Implementasi berarti pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan manusia. Grindle (1980:80) mengatakan bahwa proses implementasi ini akan di mulai jika tujuan dan sasaran sudah ditetapkan, program sudah disusun dan anggaran sudah selesai dan sudah disalurkan agar tercapainya sasaran. Konsep implementasi program dalam KBBI yakni rencana tentang asas dan usaha yang nantinya di jalankan. Charles O. Jones (dalam Abidin, 2002:199) menyatakan program adalah sebuah komponen di suatu kebijakan. Program adalah suatu upaya yang memiliki wewenang dalam mencapai sebuah tujuan. Charles O. Jones menyebutkan terdapat tiga pilar aktivitas ketika pengoperasian program yakni Organisasi, Interpretasi (pemahaman) dan penerapan.

Pengertian Partisipasi

Partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, yang di maksudkan yaitu masyarakat (Pasaribu, 1982:7). Sutarta (2002: 23) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu pertama partisipasi dalam mengambil keputusan, kedua partisipasi dalam melaksanakan rencana, ketiga partisipasi dalam merasakan dan menikmati hasil dan keempat partisipasi dalam evaluasi.

Konsep Program RT BERSIH

Rukun tetangga (RT) yang telah berkembang selama ini merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Malinau untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. RT merupakan wadah dan forum kebersamaan bagi masyarakat untuk memelihara kerukunan, memajukan kehidupan sosial dan ekonomi, menjaga solidaritas dan modal sosial sekaligus perubahan. RT BERSIH adalah pembangunan berbasis rukun tetangga yang meletakan tempat (fokus) pembangunan ditingkat RT. Ketua dan pengurus RT bersama warga setempat yang merupakan unit komunitas terkecil (grass root) sebagai basis dan sekaligus pelaku utama pembangunan yang terlibat langsung dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Program RT BERSIH memiliki lima komponen penting dalam memahami konsep program, adapun komponen yang perlu diketahui sebelum melaksanakan program RT BERSIH ini yaitu pertama program RT BERSIH ini memiliki Dasar Hukum, kedua program RT BERSIH ini memiliki Maksud, ketiga program RT BERSIH ini memiliki Tujuan, keempat program RT BERSIH ini memiliki Prinsip, kelima program RT BERSIH

memiliki Pembiayaan Pelaksanaan program RT BERSIH dan Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi RT.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi program RT BERSIH yang dilaksanakan di desa Tanjung Lapang RT III, Kecamatan Malinau Barat. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik analisis data induktif, yaitu metode analisis dengan membuat teori berdasarkan fenomena nyata atau fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti memilih informan yang menjadi pelaku dalam program, yang berkompeten dan ahli di bidang yang diteliti.

Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Tanjung Lapang RT III, Kecamatan Malinau Barat merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Di wilayah ini merupakan salah satu desa yang sudah melaksanakan Program RT BERSIH sejak tahun 2017 hingga sekarang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi program RT BERSIH bdi dasarkan pada mekanisme tertentu, adapun mekanisme program RT BERSIH yang sesuai dengan Pedoman RT BERSIH yaitu:

1. Tahap Persiapan, pada tahap persiapan ini memiliki tiga pokok kegiatan yaitu (1) membangun kesepahaman dan kesepakatan, (2) menyiapkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan pedoman pelaksanaan, (3) menata organisasi dan membentuk kepengurusan RT. Selanjutnya dalam tahap persiapan juga perlunya diadakan pembekalan terhadap seluruh ketua RT dan perancangan program RT BERSIH itu sendiri.

2. Tahap Perencanaan, pada tahap perencanaan ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan melalui penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta penyusunan berbagai peraturan desa. Tahap perencanaan ini didasarkan pada pemberdayaan masyarakat, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efiseinsi, berkelanjutan, cermat, proses berulang dan penggalan informasi.

3. Tahap Penganggaran, pada tahap penganggaran dilaksanakan untuk menyiapkan alokasi dan penyaluran dana RT BERSIH melalui APBDesa. Seluruh alokasi dana RT BERSIH dikelola melalui APBDesa yang disusun setiap tahun. Pengelolaan dana RT BERSIH sebagai bagian APBDesa memperhatikan disiplin anggaran yang didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil dan mengutamakan prinsip

transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Dalam mendukung pelaksanaan RT BERSIH seluruh SKPD Kabupaten Malinau memperhatikan secara sungguh-sungguh permasalahan warga RT setiap desa dan kecamatan. Setiap program dan kegiatan disusun dalam Rencana kerja Anggaran, SKPD harus benar-benar terukur, berbasis kerja, tepat kelompok sasaran dan tepat lokasi sehingga bermanfaat secara nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan desa. Dalam upaya mendorong pengelolaan dana RT BERSIH secara efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan maka setiap ketua RT perlu menyusun rencana kegiatan yang menjadi dari APBDesa. Penyiapan anggaran dana RT BERSIH mencakup dua subtransi program dan kegiatan yaitu (1) program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana RT BERSIH melalui APBDesa dan dikelola oleh pengurus dan warga RT setiap desa, (2) program dan kegiatan yang dibiayai dana Gerdema, (3) dana sektoral melalui SKPD atas usulan desa dalam Musrenbangdes, (4) dana dari sumber lain baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Pusat maupun pihak ketiga. Pencairan dana RT BERSIH dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, pemegang kekuasaan pengelolaan dana RT BERSIH adalah ketua RT yang bertanggung jawab kepada Bupati Malinau melalui Kepala Desa yang mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

4. Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini warga RT dapat membentuk kelompok bersama dalam melaksanakan kegiatan RT BERSIH sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah warga RT. Ketua RT bertindak sebagai pelaksana teknis program RT BERSIH dan sekretaris RT bertindak sebagai kordinator administrasi.

5. Tahap Pelaporan, pada tahap ini Setiap pelaksanaan kegiatan RT BERSIH diwajibkan membuat laporan kemajuan kegiatan fisik maupun nonfisik dan laporan pertanggung jawaban keuangan.

6. Tahap Evaluasi/Monitoring, kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RT BERSIH sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

1. Implementasi Program RT BERSIH di Desa Tanjung Lapang RT III

a. Bidang Tata Kelola Pemerintah

Implementasi program RT BERSIH pada bidang Tata Kelola Pemerintah dilakukan guna mendukung pelaksanaan fungsi Pemerintah dan pelayanan di tingkat rukun tetangga. Contoh kegiatan pada bidang Tata Kelola Pemerintahan yaitu kegiatan Musrenbang RT serta pengadaan barang inventaris perlengkapan insidental seperti tenda acara, kursi plastik, laptop, printer, infokus, mesin perontok padi, perahu, mesin pemotong rumput, peralatan memasak, makan, minum dan masih banyak lagi, yang dikelola oleh pengurus RT melalui dana RT BERSIH.

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, Ketua RT III selaku koordinator pelaksana di lapangan mengatakan bahwa dalam bidang Tata Kelola Pemerintah, kegiatan yang berkaitan dengan bidang ini yakni Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang RT) dan penyediaan barang atau alat yang memiliki fungsi pendukung penyediaan fasilitas dalam kegiatan RT. Berikut ini hasil wawancara Ketua RT III selaku pengurus RT dan koordinator program, menjelaskan mengenai implementasi program pada bidang tata kelola pemerintah:

“Adapun program di RT III pada bidang Tata Kelola Pemerintahan yaitu seperti kegiatan Musrenbang RT, serta pengadaan barang inventaris RT. pelaksanaan Musrenbang pada program RT BERSIH ini bertujuan untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan yang menjadi kegiatan prioritas di wilayah Tanjung Lapang khususnya. Dalam kegiatan musrenbang RT ini biasanya dihadiri oleh seluruh warga RT setempat, LP3MD yang beranggotakan akademisi, satgas/relawan dari PNS dan non PNS, toko masyarakat, toko agama serta toko adat. Hasil dari musrenbang RT itu berisi daftar skala prioritas dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan menggunakan dana RT BERSIH yang sumbernya dari dana APBD Kabupaten maupun dana APBD provinsi. Lalu untuk tujuan dilakukannya Inventaris barang RT ialah untuk memberikan fasilitas yang dapat digunakan bersama, maksudnya ketika warga mengadakan acara syukuran dan lain-lain warga tidak perlu lagi pusing mencari pinjaman kursi dan tenda acara, begitu juga alat-alat lainnya seperti piring, kualiti dan masih banyak lagi barang yang sudah diadakan sebagai inventaris RT, untuk inventaris barang RT biasanya ini berskala rumah tangga yang memiliki fungsi kegunaan kebutuhan sehari-hari” (Wawancara pada 16 Februari 2024).

b. Bidang Infrastruktur

Implementasi pada bidang Infrastruktur memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik yang bertujuan untuk kepentingan umum dan kepentingan pribadi warga. Contoh kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bidang infrastruktur seperti pembangunan kantor RT, pembuatan drainase, pembuatan semenisasi lapangan TK, semenisasi gang, pembangunan poskamling, pembuatan tangga sungai, kegiatan rehab rumah, pembuatan wc dan septic tank. Implementasi program RT BERSIH memberikan manfaat terhadap penataan dan perbaikan serta pengadaan sarana prasarana fisik yang bersumber dari dana RT BERSIH.

Berikut ini hasil wawancara Kepala Desa Tanjung Lapang, selaku Pemerintah Desa menjelaskan program RT BERSIH yang berkaitan dengan bidang infrastruktur:

“Adapun pelaksanaan program RT BERSIH pada bidang Infrastruktur yang berkaitan dengan kegiatan sarana dan prasarana seperti pembangunan dan

rehabilitasi rumah sehat, penataan sanitasi lingkungan RT, pemeliharaan dan pembangunan jalan, pengelolaan sampah dan air limbah, pembangunan dan pemeliharaan taman bermain anak, penataan ruang terbuka hijau, pembangunan dan pemeliharaan tempat olahraga serta pembangunan dan pemeliharaan Poskamling” (Wawancara pada 20 februari 2024).

Berikut ini hasil wawancara Ketua RT III selaku pengurus RT dan koordinator program menjelaskan mengenai implementasi program pada bidang infrakstruktur:

“Pada bidang infrakstruktur yang sudah terlaksana khususnya di RT III itu seperti bantuan rehab rumah warga (berupa bantuan material), ada pembuatan WC dan SPAL, ada juga semenisasi gang, pembuatan tangga sungai, pembuatan pos keamanan lingkungan (poskamling), pembuatan kantor RT III dan gudang penyimpanan barang hingga perbaikan lapangan voli” (Wawancara pada 16 Februari 2024).

c. Bidang Sumber Daya Manusia

Implementasi program RT BERSIH pada bidang sumber daya manusia dilakukan guna meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Implementasi program memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan kepada anak-anak warga desa Tanjung Lapang RT III, seperti bantuan dana untuk membayar osis atau membeli kebutuhan sekolah. Bantuan ini diberikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK hingga Mahasiswa. Implementasi di bidang SDM selain pendidikan juga dapat dilihat pada bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan berkenaan dengan pemberian makanan tambahan kepada anak usia dini dengan kondisi ekonomi rendah bertujuan untuk membantu memperbaiki gizi serta bantuan pemberian vitamin kepada balita dalam upaya pencegahan kasus stunting.

Berikut ini hasil wawancara Ketua RT III selaku pengurus RT dan koordinator program menjelaskan mengenai implementasi program pada bidang sumber daya manusia:

“Pada bidang pendidikan yang sudah dilaksanakan seperti diberi bantuan perlengkapan sekolah bagi anak sekolah dasar (SD), tingkatan SMP hingga mahasiswa menerima uang tunai. Bantuan dana ini diharapkan dapat membantu mengurangi biaya ekonomi keluarga kurang mampu dalam memfasilitasi kebutuhan sekolah anak. Bantuan dana diberikan kepada penerima dengan jumlah yang disesuaikan menurut tingkat pendidikannya. Tujuan bantuan ini ialah untuk meringkankan ekonomi keluarga dengan ekonomi rendah, pembagian bantuan ini menurut tingkatannya seperti tingkatan SMP hingga SMA biasanya uang yang diberikan untuk keperluan membayar osis, sedangkan mahasiswa untuk keperluan membeli buku. Lalu pada bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan di RT sini biasanya ada bantuan makanan tambahan bagi anak TK, pembagian telur dan susu untuk keluarga yang memiliki balita

dengan ekonomi rendah, ada juga bantuan pemeriksaan sekaligus pemberian vitamin kepada anak-anak usia dini dengan bekerjasama dengan pihak puskesmas yang dilakuakn melalui kegiatan posyandu anak yang biasanya dilaksanakan setiap sebulan sekali” (Hasil wawancara pada 16 Februari 2024).

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Program

A. Faktor Penghambat

a) Faktor Komunikasi

Dalam program RT BERSIH komunikasi dibutuhkan untuk menerima dan merelisasikan aspirasi warga dengan mengadakan pertemuan musyawarah guna mengetahui aspirasi dan keluhan yang berada di lingkungan. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang transparan dan jelas. Masyarakat sebagai landasan pembangunan bebas dan memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya terkait program atau kegiatan yang ingin dilakukan. Dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan adanya komunikasi organisasi yang mampu mengembangkan sikap anggota untuk merubah pola pikir dan pola perilakunya sehingga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut sesuai dengan pendapat Andrew E. Sikula (2017:145) yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses memindahkan informasi dan pemahaman dari individu kepada individu lainnya. Adapun komunikasi yang berjalan selama program berjalan di lingkungan RT III ternyata masih kurang baik. Berikut ini penjelasan oleh Bendahara RT III, selaku bagian pengurus RT mengatakan bahwa:

“Warga RT III ini masih banyak yang kurang kritis untuk menanggapi dan memberikan saran kegiatan, kebanyakan warga cenderung hanya menerima saran tanpa ada kritikan apapun, jadi saran dan ide sangat minim sekali” (wawancara pada 17 Februari 2024).

b) Terbatasnya Kualitas SDM

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia pada pengurus rukun tetangga (RT) secara khusus ketua yang berperan penting dalam menjalankan program. Implementasi dilapangan didapati bahwa tidak semua ketua RT dapat bertanggung jawab untuk memperhatikan warganya secara adil. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki karakter dan kemampuan sangat minim sehingga dalam program ada saja warga yang merasa kurang puas. Maka Pemerintah Kabupaten Malinau selalu mengupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan kegiatan pembekalan untuk para ketua RT. Kualitas sumber daya manusia dioptimalkan peranannya untuk mencapai tujuan dari program ini. Berikut ini penjelasan Kepala Desa mengenai pentingnya pembekalan ketua RT dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia:

"Untuk hal ini Pemerintah sudah membuat program pembekalan untuk para ketua RT yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, motivasi serta membentuk karakter dan sikap untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai ketua RT yang profesional. Pembekalan ini menciptakan ketua RT yang dapat berperan sebagai pembaharuan juga semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat" (Wawancara pada 20 februari 2024).

c). Keterbatasan Kelembagaan Pendamping

Keterbatasan kelembagaan pendamping yang bertanggung jawab untuk mendampingi proses kegiatan masih sangat minim. Sementara, lembaga dan pengawas dalam hal ini sangat penting dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif, sesuai dengan rencana, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Lembaga yang mendampingi RT ditangani oleh Lembaga Pemberdayaan dan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (LP3MD) untuk mendampingi seluruh pengurus RT di wilayah Malinau secara khusus pada kegiatan musrenbang di tingkat RT. pada nyatanya komponen implementasi sebagai pengawas dan pendampingan masih sangat kurang dilakukan di setiap RT. Berikut penjelasan Kepala Desa selaku bagian Pemerintah, mengatakan bahwa:

"Saya selaku kepala desa melakukan pemantauan kegiatan RT BERSIH dan kadang memberikan saran kepada warga RT dan ketua RT untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu saya secara rutin memberikan laporan kepada camat tentang kemajuan kegiatan yang sudah dilaksanakan, permasalahan yang terjadi serta solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah tersebut, sebenarnya dalam kelembagaan pendamping ini karena tidak sepenuhnya berjalan maka diberikan peran kepada warga dalam melaksanakan sekaligus memantau kegiatan, hal ini masuk dalam prinsip RT BERSIH yaitu bagian Prinsip Partisipasi" (Wawancara pada 20 Februari 2024).

d). Perubahan Cuaca

Perubahan cuaca merupakan suatu fenomena alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Perubahan cuaca seperti turunnya hujan menjadi penghambat ketika melaksanakan kegiatan pembangunan, perubahan cuaca membuat tertundanya kegiatan pembangunan yang bersifat infrakstruktur. Hal tersebut dijelaskan oleh pengurus RT bahwa perubahan cuaca juga mempengaruhi terhambatnya proses kegiatan. Berikut penjelasan Ketua RT III, beliau mengatakan bahwa:

"Pembangunan yang bersifat outdoor seringkali tertunda karena kondisi cuaca yang tidak mendukung, pekerjaan yang ditargetkan kadang tidak berjalan lancar. Selain hujan yang membuat tertundanya kegiatan, suhu panas yang berlebihan juga membuat pekerjaan pembangunan ini tidak dapat berjalan optimal, cuaca yang berubah-ubah mempengaruhi

kondisi kesehatan, maka tidak dapat dipaksakan. Selain pembangunan kegiatan lain seperti kerja bakti lingkungan juga sering tertunda karena kondisi cuaca” (Wawancara pada 16 Februari 2024).

e). Keterlambatan Pencairan Dana

Keterlambatan pencairan dana mengakibatkan tertundanya proses pembangunan, pendanaan menjadi unsur terpenting di dalam pembangunan, segala kebutuhan bahan dan alat membutuhkan dana. Apabila dana terhambat maka pembangunan juga akan tertunda. Ketua RT menjelaskan bahwa karena keterlambatan pencairan dana ini menyebabkan tertundanya semua kegiatan yang sudah direncanakan dan bahkan tidak tepat waktu. Berikut penjelasan Ketua RT III, beliau mengatakan bahwa:

“Terkendalanya pencairan dana ini dikarenakan desa Tanjung Lapang sendiri memiliki 14 RT, permasalahannya adalah pengumpulan rencana anggaran bangunan (RAB) yang tidak serentak, sementara pencairan dilakukan ketika semua RT sudah lengkap mengumpulkan laporan tersebut ke desa”(Wawancara pada 16 Februari 2024).

f). Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat sebuah implementasi program, tanpa adanya partisipasi masyarakat maka implementasi program tidak dapat berjalan lancar. Dalam implementasi program RT BERSIH harus ada sebuah rangsangan dari Pemerintah dan pengurus RT agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Partisipasi Masyarakat desa Tanjung Lapang masih minim dalam mengikuti setiap kegiatan di lingkungan. Kurangnya partisipasi ini di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kepentingan bersama dan sibuk dengan urusan masing-masing. Namun tidak semua warga memiliki karakter atau sifat tersebut terbukti masih adanya partisipasi warga namun tidak menyeluruh. Berikut penjelasan Ketua RT III beliau mengatakan bahwa:

“Partisipasi warga sudah lumayan baik dalam menjalankan kegiatan-kegiatan lingkungan seperti kerjabakti dan kegiatan-kegiatan tahunan dalam memperingati hari-hari penting, seperti kegiatan formal maupun informal. Namun memang kadang jumlah warga yang terlibat masih sangat kurang dan yang selalu terlibat juga hanya orang-orang yang biasanya. Kurangnya partisipasi ini banyak disebabkan karena kesibukan pekerjaan warga sebagai petani” (Wawancara pada 16 Februari 2024).

Selain itu, informan selanjutnya yaitu Kepala Desa juga berpendapat bahwa partisipasi masyarakat salah satu permasalahan yang sering terjadi, berikut penjelasannya:

“Menumbuhkan rasa kebersamaan dan ikut serta dalam mengambil bagian untuk melaksanakan kegiatan sebenarnya adalah tantangan yang harus ditaklukkan oleh setiap ketua RT, masyarakat memiliki prioritasnya masing-masing yang tidak dapat kita atur, memang partisipasi masyarakat

hingga sekarang masih menjadi problematik yang tidak dapat dihindari” (wawancara pada 20 februari 2024).

B. Faktor Pendukung

a). Faktor Struktur Birokrasi

Fungsi dari struktur birokrasi adalah untuk mempermudah koordinasi antara Pemerintah Desa dengan ketua RT. Program RT BERSIH dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi. Dalam menjamin tercapainya tujuan dan sasaran RT BERSIH di butuhnya pengorganisasian yang melibatkan pelaku-pelaku pembangunan melalui badan pengurus yang berkompeten. Struktur birokrasi RT III desa Tanjung Lapang terdiri dari satu orang ketua RT dibantu oleh satu sekretaris dan satu orang bendahara, fungsi dari struktur birokrasi yang sederhana ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi implementasi program. Berikut penjelasan Ketua RT III terkait bentuk struktur birokrasi yang ada di RT III:

“Bentuk struktur birokrasi di tingkatan Rukun Tetangga (RT) sangat sederhana terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara serta beberapa seksi bidang seperti Humas, Sosial, Kepemudaan & Olahraga, dan Keamanan” (wawancara pada 16 Februari 2024).

b). Pendanaan

Dalam sebuah program pendanaan merupakan hal yang paling penting agar program dapat berjalan lancar. Pendanaan pada program RT BERSIH ini menjadi suatu faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan. Pendanaan program RT BERSIH didapatkan dari APBD Kabupaten Malinau dengan alokasi dana Rp 260.000.000/Tahun. Adapun dana yang di alokasikan untuk program RT BERSIH ini setiap tahunnya disalurkan melalui Pemerintah desa dan menjadi kesatuan dalam pengelolaan APBDes setiap tahun. Adapun tahapan penganggaran RT BERSIH meliputi dua kegiatan, pertama yaitu tahap penyiapan alokasi dana RT BERSIH dan tahap kedua yaitu pencairan dan penyaluran dana RT BERSIH. Berikut penjelasan Bendahara RT III, selaku pengurus administrasi dana RT BERSIH terkait pencairan dana:

“Ya di dalam satu tahun pencairan dana RT BERSIH biasanya dilakukan dua kali, yaitu semester pertama dan semester kedua. Semester pertama itu di bulan tujuh atau bulan delapan, dan pencairan yang kedua di desember” (Wawancara pada 17 Februari 2024).

Berikut penjelasan Kepala Desa selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengurus proses pendanaan setiap RT, beliau mengatakan bahwa:

“Pengelolaan dana RT BERSIH sebagai bagian dari APBDesa wajib memperhatikan disiplin anggaran yang didasari pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil dan harus mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan

efektivitas. Penyaluran dana dilaksanakan 2 kali setahun melalui 2 tahapan yaitu penyiapan alokasi dana RT BERSIH dan Pencairan serta penyaluran dana” (Wawancara pada 20 Februari 2024).

Maksud dari RT BERSIH

- a) RT yang Rapi adalah RT yang sadar, mau dan mampu mengelola administrasi RT secara baik, teratur dan transparan serta menyenangkan dan memuaskan warga,
- b) RT yang Tertib adalah RT yang sadar, mau dan mampu menata lingkungan RT secara baik, rukun dan damai bebas dari penyalahgunaan minuman keras dan narkoba serta bebas dari gangguan keamanan dan konflik,
- c) RT yang Bersih adalah RT yang sadar, mau dan mampu menjaga dan mengelola lingkungan RT yang hijau, bebas dari sampah, kotoran dan bahan pencemar berbahaya,
- d) RT yang Sehat adalah RT yang sadar, mau dan mampu mengajak warga hidup berperilaku sehat dan hidup dalam lingkungan rumah yang sehat serta dapat mengembangkan potensi ekonomi, seni dan budaya secara optimal,
- e) RT yang Indah adalah RT yang sadar, mau dan mampu mempertahankan dan meningkatkan mutu lingkungan RT yang kondisinya enak dipandang, nyaman didiami dan mempermudah aktivitas,
- f) RT yang Harmonis adalah RT yang sadar, mau dan mampu mewujudkan lingkungan RT yang selaras dan serasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi program RT BERSIH di desa Tanjung Lapang RT III memberikan banyak manfaat terkhusus pada tiga bidang prioritas penelitian yaitu: bidang tata kelola pemerintahan, bidang infrakstruktur dan bidang sumber daya manusia. Kegiatan yang diselenggarakan dalam mewujudkan pembangunan di desa ini melalui musyawarah bersama yang berkenaan dengan kegiatan Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat rukun tetangga. Melalui program ini terbukti dapat perbaikan sarana dan prasana RT, penyediaan fasilitas yang memadai serta memperbaiki tatanan kehidupan warga kearah yang lebih baik. Ada beberapa faktor yang masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan program seperti terbatasnya komunikasi, terbatasnya kualitas SDM, keterbatasan kelembagaan pendamping RT, perubahan cuaca, keterlambatan pencairan dana serta kurangnya partisipasi masyarakat. Adapun faktor yang mendukung implementasi program dalam penelitian ini yaitu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Malinau dengan memberikan dana sebesar Rp 260.000.000 kepada setiap RT setiap tahun, serta bentuk strukutr birokrasi yang berkompeten dalam mengimplementasikan program.

Pada desa Tanjung Lapang, khususnya RT III sendiri sudah sangat baik dalam mengimplementasikan program RT BERSIH ini sesuai dengan tujuan program yaitu pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan pembangunan didaerah tempat tinggal. Kegiatan yang berjalan dalam program ini sudah dilakukan dengan sangat baik, meskipun masih ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program. Dukungan dari Pemerintah melalui pendanaan memberikan kesadaran bahwa Pemerintah Daerah percaya penuh kepada warganya untuk dapat membantu dalam proses pembangunan desa dalam mewujudkan Kabupaten Malinau menjadi Kabupaten yang lebih baik lagi mulai dari Pemerintahnya, infrakstrukturnya hingga sumber daya manusianya.

Saran

1. Diharapkan Program RT BERSIH di Kabupaten Malinau dapat terus dilanjutkan guna meningkatkan pembangunan yang tujuannya untuk bersama-sama berubah dalam meraih kemajuan dan kesejahteraan melalui pembangunan di lingkungan terkecil yaitu rukun tetangga.
2. Untuk selanjutnya sangat diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Malinau terlebih kepada warga desa Tanjung Lapang RT III agar memiliki kesadaran yang besar akan pentingnya partisipasi dalam menjalankan dan menyukseskan program RT BERSIH ini.
3. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan analisis lanjutan mengenai program RT BERSIH yang ada di Kabupaten Malinau, dengan harapan peneliti berikutnya untuk melakukan kembali analisis implementasi dengan memperluas variabel penelitian yang digunakan sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih luas lagi.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, & Suriyani, E. (2022). Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belimbing Rayakecamatan MurungPudak Kabupaten Tabalong. *Japb*, 5(1), 1–14.
- Amrullah, Heri Kurniawansyah, & Rismawati. (2021). Implementasi Program Kebersihan, Keindahan, Dan Ketertiban (K3) Di Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 2(2), 67–72.
- Oktaviani, O., & Muchtar, H. (2019). Implementasi Program Kampung BANTAR (Bersih, Aman dan Pintar) di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. *Journal of Civic Education*, 2(4), 260–269.
<https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.160>
- Dr. Ir. Suradi, ST., M. (2022). *Pemodelan Sistem “Sebuah Pengantar.”* Tohar Pangeshi, D. (2020). *11 Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Para Ahli*. [Www-Brilio-Net.Cdn.Ampproject.Org](http://www.brilio-net.cdn.ampproject.org). <https://www.brilio.net/serius/11-pengertian-sumber-daya-manusia-menurut-para-ahli-200416b.html>

- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
[https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Jumroh, M. Y. J. P. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik. *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik*, 81–150
- Andra Tersiana, S.TP, M. S. (n.d.). *Metode Penelitian Oleh Andra Tersiana.pdf*.
- Andrew E. Skilu. (2017). *Komunikasi Bisnis*. Surakarta: Erlangga
- Grindle, M.S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yansen, T. (2022). *Dari Malinau Untuk Indonesia 'Budaya Membangun Bangsa'*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Yansen, T. (2017). *Revolusi RT 'Tiga Pilar Gerdema Strategi Revolusioner: Membangun Komunitas Rukun Tetangga yang Maju Sejahtera'*. Jakarta: Elax Media Komputundo
- Utara, P. K. (2017). *Bupati 1 provinsi*.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan yang baik)*". Bandung: PT. Refika Editama
- Pasaribu, I.L., dan Simanjutak, B. 1982. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Tarsito
- Sutarta, A. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Jakarta: gramedia Pustaka Utama.
- Kartasasmita, G. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Kepada Masyarakat*. Yogyakarta: UGM.
- dishubkominfo kab malinau. (2016). *Pelaksanaan Bulan Bakti RT Bersih Serentak Di Kabupaten Malinau*. Infopublik.Id.
<https://infopublik.id/kategori/nusantara/163816/index.html>
- Kaltara.bpk.go.id. (n.d.). *Profil Pemerintah Kabupaten Malinau*.
[Humastu.Kaltara@bpk.Go.Id.https://kaltara.bpk.go.id/profil-pemerintah-kabupaten-malinau/](https://kaltara.bpk.go.id/profil-pemerintah-kabupaten-malinau/)
- Sanip, A. (2016). *Dapat Apresiasi Malinau Lebih Dulu Membangun Dari Desa*. Kaltara.Protokol.Co. <https://malinau.go.id/post/dapat-apresiasi--malinau-lebih-dulu-membangun-dari-desa/401>
- Sanip, A. (2018). *RT Bersih Punya Makna Luas*. Kaltara.Protokol.Co.
<https://kaltara.prokal.co/read/news/20363-rt-bersih-punya-makna-luas.html>
- Sobirin, S. (2022). *Penggunaan Anggaran RT Bersih Harus Maksimal*. KoranKaltara.<https://korankaltara.com/penggunaan-anggaran-rt-bersih-harus-dimaksimalkan>
- Supri, M. (2021). *10 Tahun Dampingi Yansen Tipa Padan di Malinau, Begini sosok Wagub Kaltara di Mata Topan Amrullah*. Kaltara.Tribunnews.Com.
<https://kaltara.tribunnews.com/2021/02/10-tahun-dampingi-yansen-tipa-padan-di-malinau-begini-sosok-wagub-kaltara-di-mata-topan-amrullah>